

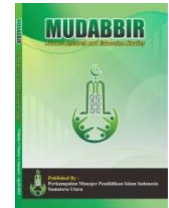


# JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 4. Nomor 2 Tahun 2024

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

## Modal Sosial Etnis Mandailing di Kota Medan Abad ke-20

Samsul Bahri<sup>1</sup>, Pujiati<sup>2</sup>, Nursukma Suri<sup>3</sup>, Rahimah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: [samsulrodia@gmail.com](mailto:samsulrodia@gmail.com)<sup>1</sup>, [pujiati@usu.ac.id](mailto:pujiati@usu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[nursukmasuri@usu.ac.id](mailto:nursukmasuri@usu.ac.id)<sup>3</sup>, [rahimahahmad264@gmail.com](mailto:rahimahahmad264@gmail.com)<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modal sosial etnis Mandailing di Kota Medan pada abad ke-20. Metode penelitian ini dilakukan dalam empat tahap, yakni pengumpulan sumber (heuristik), pemeriksaan sumber-sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi), dan penulisan (historiografi) yang berbasis pada kajian literatur (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa etnis Mandailing adalah salah satu kelompok masyarakat pendatang yang cukup diperhitungkan keberadaannya di Medan. Hal ini terlihat dari penerimaan masyarakat Melayu sebagai kelompok tuan rumah terhadap mereka. Ini semua tidak terlepas dari beberapa modal sosial yang mereka miliki ketika bermukim di Medan. Setidaknya ada lima modal sosial yang dimaksud, yaitu: agama yang sama dengan kelompok Melayu yakni Islam, memiliki corak keagamaan yang sama sebagai muslim tradisional dalam lingkup *ahlu sunnah wal jama'ah* serta berpegang teguh pada mazhab Syafi'i, kemampuan adaptasi dengan masyarakat lokal melalui proses akulturasi dengan cara meninggalkan sebagian identitas mereka sebagai orang Mandailing, sangat minimnya etnis Mandailing menyentuh ranah politik praktis yang dianggap membahayakan kedudukan politik pemerintah lokal (sultan dan elit Melayu), dan adanya kontribusi mereka dalam bidang pendidikan semisal melalui lembaga Maktab Islamiyah Tapanuli maupun organisasi Al-Jam'iyatul Washliyah yang lahir pada tahun 1930.

**Kata Kunci:** *Al-Washliyah, Islam, Mandailing, Melayu, Modal Sosial.*

### ABSTRACT

*This research aims to find out the social capital of Mandailing ethnic in Medan City in the 20th century. This research method is conducted in four stages, namely collecting sources (heuristics), checking sources (verification), interpreting (interpretation), and writing (historiography) based on library research. The results show that Mandailing ethnic is one of the immigrant community groups that is quite calculated in Medan. This can be seen from the acceptance of the Malay community as the host group towards them. This is all inseparable from some of the social capital*

*they have when settling in Medan. There are at least five social capitals in question, namely: the same religion as the Malay group, namely Islam, has the same religious style as a traditional Muslim within the scope of ahlu sunnah wal jama'ah and adheres to the Shafi'i school of thought, the ability to adapt to local society through the acculturation process by leaving some of their identity as Mandailing people, the lack of ethnic Mandailing touching the realm of practical politics which is considered to endanger the political position of the local government (sultan and Malay elite), and their contribution in the field of education such as through the Maktab Islamiyah Tapanuli institution and the Al-Jam'iyatul Washliyah organisation which was born in 1930.*

**Keywords:** *Al-Washliyah, Islam, Mandailing, Malay, Social Capital.*

## **PENDAHULUAN**

Etnis Mandailing yang bermigrasi ke Kota Medan sejak awal abad 20 M dari tanah leluhurnya Tapanuli bagian Selatan yang merupakan bagian dari Keresidenan Tapanuli (*Tapanoeli residentie*) telah menjadi catatan penting dalam sejarah. Komunitas masyarakat tersebut telah banyak mewarnai kehidupan di Kota Medan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan, politik, dan kebudayaan. Kemampuan adaptasi mereka dengan kelompok Melayu sebagai “tuan rumah” sangat bagus sehingga tidak menimbulkan kendala yang begitu berarti. Pada level yang lebih tinggi secara sosial mereka mau berakulturasi dengan etnis Melayu semisal dengan cara menghilangkan sebagian identitas kemandailingannya (Lubis, 2014). Bahkan pada perjalanannya itu sebagian dari anak-anak dan keturunan mereka terutama generasi kedua atau ketiga lebih bangga disebut-sebut sebagai anak Melayu.

Jika melihat ke belakang migrasi etnis Mandailing ke Medan maupun ke wilayah Sumatera Timur lainnya tidaklah berjalan begitu saja melainkan juga terkait kondisi di kampung halaman (Sari & Suri, 2024). Beberapa faktor yang mendorong itu antara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, akibat kekejaman kolonial Belanda dalam hal *blasting* (pajak) dan kerja paksa, serta keinginan belajar agama atau ilmu pengetahuan (Pulungan, 2008). Kehadiran etnis Mandailing tersebut juga sejalan dengan situasi politik yang saat itu terjadi yakni adanya dominasi pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1900-an kesultanan-kesultanan Melayu itu dijadikan sebagai daerah swapraja melalui sebuah kontrak politik. Untuk Deli sendiri kontrak politik tersebut dibuat pada tanggal 2 Juni 1907 yang kemudian diubah tanggal 2 Juli 1907. Kontrak-kontrak politik tersebut tentu tidak serta merta menghilangkan kedaulatan dari wilayah-wilayah kesultanan ini (Zein, *et.al.*, 2021). Akan tetapi ada sejenis pembagian kewenangan antara Kesultanan Melayu Deli dengan pemerintah Hindia Belanda.

Bagi etnis Mandailing untuk bisa eksis di Medan kala itu tidaklah perlu masuk ke dalam ranah politik elit kekuasaan atau pergerakan-pergerakan lainnya yang dianggap mengandung unsur pertarungan yang keras sehingga kadang-kadang bisa berisiko membawa mereka berurusan dengan pihak pemerintah kolonial. Dalam hal ini cukuplah etnis Mandailing itu menggunakan beberapa modal sosial yang dimiliki

sehingga tetap bisa diterima oleh kalangan Melayu dan mereka pun tidak dianggap sebagai pesaing. Selain itu modal sosial yang melekat etnis Mandailing juga tampaknya tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai (falsafah) hidup Melayu yakni: (1) Melayu itu Islam, yang sifatnya universal dan demokratis, (2) Melayu itu berbudaya, yang sifatnya Nasional dalam berbahasa, sastra tari, pakaian, dan tersusun dalam tingkah laku, (3) Melayu itu beradat, (4) Melayu itu bertari, yaitu tersusun dalam masyarakat yang rukun tertib mengutamakan ketenteraman dan kerukunan, dan (5) Melayu itu berilmu, artinya pribadi yang diarahkan kepada ilmu pengetahuan dan ilmu kebatinan agar bermarwah dan disegani orang (Zein, *et.al.*, 2021).

Modal sosial yang dimaksud ini setidaknya tercermin pada lima hal yakni: agama, corak pemikiran keagamaan, kemampuan akulturasi, berjarak dengan politik, dan menggerakkan pendidikan. Dari segi keagamaan ada persamaan yang begitu melekat antara orang-orang Mandailing dengan etnis Melayu sebagai masyarakat tempatan di Medan yakni penganut agama Islam. Sejalan dengan ini dari segi corak pemahaman keislaman sama-sama memegang teguh madzhab Syafi'i dan ber'itikad *ahlu sunnah wal jama'ah*. Begitu pula dalam hal pergerakan, kelompok etnis Mandailing tidaklah terlampau genit dalam hal meraih kekuasaan politik sehingga mereka tetap dianggap sebagai kelompok yang "tidak membahayakan" bagi elit-elit pemerintah lokal Melayu. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya bahwa elit-elit etnis Mandailing di Medan berkontribusi besar dalam pengembangan pendidikan sehingga abad 20 Medan itu tidak hanya dikenal sebagai kota modern yang kosmopolit serta geliat ekonominya tetapi sudah mulai tumbuh menjadi kota pendidikan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penulisan kajian ini akan menggunakan metode penelitian sejarah sebagaimana yang lazimnya digunakan yang terdiri dari pengumpulan sumber (heuristik), pemeriksaan terhadap sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi), dan penulisan (historiografi). Penelitian dilakukan berbasis pada kepustakaan (*library research*) yang menggunakan sumber dari berbagai literatur yang relevan dan berkaitan erat dengan penelitian ini. Sumber-sumber yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian di periksa guna mengetahui relevansi dan kecocokan dengan kajian penelitian. Sumber-sumber tersebut akan ditafsirkan melalui analisis yang kritis dan sistematis agar selanjutnya bisa dituliskan menjadi sebuah historiografi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam catatan sejarah persentuhan masyarakat Mandailing tidak bisa dilepaskan dari faktor geografis dan faktor politis. Dari segi geografis kawasan Tapanuli bagian Selatan yang menjadi tempat bermukim orang-orang Mandailing diapit oleh dua wilayah Islam yakni Kesultanan Melayu Sumatera Timur semisal yang terdekat ada Kesultanan Melayu Asahan dan Kota Pinang. Selanjutnya ada kawasan Minangkabau yang sudah lebih dahulu menerima pengaruh Islam dari pada Mandailing. Geografis yang sangat dekat ini otomatis mempercepat interaksi dan persentuhan dakwah Islam

ke wilayah Mandailing. Adapun mengenai faktor politis banyak pihak yang mengaitkannya keberadaan pasukan Padri dari Minangkabau yang masuk ke daerah Mandailing pada paruh ketiga abad ke 19. Gerakan Padri dianggap telah mengubah kehidupan sosial dan politis di Mandailing dari kekafiran menjadi reformisme Islam yang dibawa oleh hulubalang-hulubalang Padri, yaitu Islam Wahabi (Pelly, 2017). Meskipun demikian pendapat kedua ini secara historis mestilah disikapi secara kritis mengenai prosesnya.

Meskipun saluran persentuhan Islam di kawasan Mandailing berada ditengah-tengah perseteruan politik antara pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan pasukan Padri dari Minangkabau ternyata geliat dakwah di sana mengalami peningkatan. Masyarakat di sana tidak hanya menjadi penerima dakwah Islam tetapi juga mendalami Islam hingga ke luar dari kawasan Mandailing. Banyak di antaranya yang mengirimkan anak-anak mereka belajar agama ke luar semisal yang terdekat ada di Minangkabau atau beberapa tempat di kawasan Kesultanan Melayu Sumatera Timur. Mereka-mereka ini kemudian nantinya menjadi penerus estafet dakwah Islam dan pengembang ilmu pengetahuan di tengah masyarakat Mandailing baik di *huta* (kampung halaman) maupun di perantauan (Bahri, 2024).

Dalam sejarahnya migrasi orang-orang Mandailing ke Kota Medan berlangsung sejak akhir abad ke 19 dan di awal abad ke 20. Pulungan (2008) mengidentifikasi setidaknya ada lima faktor utama yang menjadi penyebab orang-orang Mandailing tersebut meninggalkan kampung halamannya yakni: 1) untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, 2) karena terjadi konflik dalam keluarga dan sosial, 3) pengembangan karier atau profesionalisme, 4) karena perkawinan, dan 5) karena pengembangan agama Islam. Sebagaimana yang diketahui bahwa akhir-akhir abad ke 19 kawasan Mandailing adalah potret dari zona kemiskinan yang cukup meluas akibat kebijakan pemerintah kolonial yang kejam terutama dalam hal pemberlakuan *blasting* (pajak) yang dinilai sangat menyusahkan masyarakat.

Secara khusus pindahnya mereka keluar dari Mandailing juga tidak terlepas dari adanya konflik horizontal sesama mereka baik dari internal keluarga maupun sebab adat istiadat. Selanjutnya ada pula keinginan secara alamiah untuk mengembangkan diri guna menggapai cita-cita. Begitu juga faktor perkawinan sedikit banyak telah membantu penyebaran orang-orang Mandailing ke berbagai kawasan tidak hanya ke Kota Medan bahkan ke tempat-tempat lain yang terdekat semisal Langkat dan Serdang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kalangan Mandailing sendiri memiliki cita-cita besar untuk mengembangkan dan ekspansi dakwah Islam termasuk ke kawasan perkotaan.

Salah satu destinasi perantauan etnis Mandailing adalah Kota Medan yang saat itu dikenal sebagai kawasan ekonomi terpenting di pulau Sumatera terutama dari sektor perkebunan. Dalam sejarahnya konsesi perkebunan di Medan pertama kali direstui oleh Sultan Deli Mahmud Al-Rasyid Perkasa Alamsyah (1857-1973). Kerja sama ini dilaksanakan melalui rencana perjanjian dengan pemerintah Belanda melalui *acte* yang ditandatangani olehnya sendiri serta menggunakan materai *cap mohornya* pada

tanggal 22 Agustus 1862 (1280 H) (Takari, *et.al.*, 2012). Setahun kemudian sultan memberikan pintu masuk bagi sosok Jacobus Nienhuys yang kemudian menjadi bos perkebunan terkenal di Tanah Deli sampai akhir abad ke 19 dengan *Deli Maatschapaij*-nya. Kota Medan kemudian tumbuh menjadi kawasan yang maju apalagi posisinya adalah ibukota dari Keresidenan Sumatera Timur. Perusahaan-perusahaan yang tumbuh di Medan tidak hanya mengandalkan sektor perkebunan melainkan juga sektor yang lainnya.

Dalam kapasitasnya sebagai kelompok pendatang ternyata etnis Mandailing tetap menunjukkan kontribusi-kontribusi tertentu di tengah masyarakat. Apalagi secara sosiologis etnis ini cukup juga harus bersaing dengan kelompok pendatang lain yakni etnis Minangkabau yang gerakan sosialnya cukup diperhitungkan. Adapun dari segi eksistensi etnis Mandailing di Medan abad 20 ternyata cukup mendapat kedudukan yang terhormat baik di masyarakat umum maupun di hadapan kesultanan. Kedudukan yang terhormat ini tentunya tidaklah didapatkan secara alamiah begitu saja melainkan adanya modal-modal sosial yang mereka miliki.

*Pertama*, komunitas Mandailing yang bermigrasi ke Medan umumnya adalah penganut agama Islam. Sehingga ketika masyarakat Melayu mengetahui bahwa agama orang Mandailing sama dengan mereka maka penerimaan terhadap orang Mandailing tampaknya semakin mulus. Karena dari segi kedekatan agama dan etnisitas Melayu selalu identik dengan Islam. Tidak ada orang Melayu yang menganut agama di luar Islam. Orang Melayu mengetahui betul konsep *innamal mu'minuna ikhwah* (sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara) sehingga ini dijadikan sebagai sebuah nilai pertemanan mereka ketika bersosialisasi dengan etnis Mandailing. Apalagi jauh sebelumnya etnis Mandailing maupun kelompok yang serumpun dengan mereka seperti Angkola, Padang Lawas, dan Sipirok telah menarik garis pembatas sebagai pembeda identitas mereka yang Islam dengan etnis Batak Toba yang bukan Islam. Patut diketahui bahwa semasa kolonial, orang Mandailing memandang rendah orang Batak Toba yang kebanyakan beragama Kristen yang alasan utamanya adalah karena reputasi Batak Toba dimasa lalu yang dianggap sebagai "orang yang belum beradab" (Pelly, 2017).

*Kedua*, ternyata tidak hanya sebagai penganut agama Islam, penerimaan etnis Melayu terhadap orang-orang Mandailing di Medan juga tidak terlepas dari corak pemikiran keagamaannya. Mereka adalah kalangan muslim yang memiliki pemahaman keagamaan secara tradisional. Banyak praktik keagamaan mereka yang sama dengan muslim Melayu seperti membaca lafaz niat (*ushalli*) sebelum takbir salat, doa bersama setelah shalat fardu, tahlilan, membaca doa qunut ketika salat subuh, kenduri arwah, mentalqinkan mayit di kuburan, membaca barzanji, melaksanakan maulid, dan lain sebagainya.

Selain itu, ada lagi yang terpenting adalah berpegang teguh pada ajaran madzhab Syafi'i. Mungkin kita masih ingat bagaimana Al-Jam'iyatul Washliyah yang dulunya didirikan oleh orang Mandailing di Medan tahun 1930 yang pada periode awal dalam anggaran dasar organisasinya dengan tegas mengatakan: *perkumpulan ini*

*berazaskan Islam, dalam hukum fiqh bermadzhab Syafi'i, dan dalam i'tikad ahlu sunnah wal jama'ah* (Sulaiman, 1956). Mufti-mufti sultan umumnya adalah ulama besar alumni Makkah dan sebagiannya dari Al-Azhar yang sangat pakar dalam ajaran mazhab Syafi'i. Tidak mengherankan jika dalam sejarahnya mazhab ini pulalah yang ditetapkan secara resmi oleh pihak kesultanan (Zebua, 2019).

Corak pemahaman keagamaan inilah yang tampaknya berbeda dengan kelompok pendatang lainnya yakni etnis Minangkabau yang dikenal sebagai pengusung corak keagamaan modernis, di mana menjadi yang salah satu cirinya adalah ketidakterikatan mereka dengan salah satu mazhab fiqh Islam saja. Organisasi Muhammadiyah sendiri mengusung konsep tajdid dan dalam hal mengambil hukum keagamaan selalu mengandalkan konsep *tarjih* (pendapat paling kuat). Umumnya pula para perantau Minangkabau itu berpayung pada organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912. Dari sini tampaknya ada penambahan orientasi dari organisasi agama plus organisasi paguyuban (Bahri, 2024). Pada perjalanannya fakta sejarah memang menunjukkan adanya polarisasi etnis dan organisasi di mana etnis Mandailing selalu diasosiasikan dengan Al-Washliyah dan begitu pula etnis Minangkabau diasosiasikan dengan organisasi Muhammadiyah.

*Ketiga*, etnis Mandailing rupa-rupanya adalah kelompok masyarakat yang sangat bijak dalam memaknai ungkapan: *di mana bumi dipijak, di situ pula langit dijunjung*. Kemampuan beradaptasi dan sekaligus berakulturasi dengan kelompok Melayu di Medan patut juga digolongkan sebagai modal sosial etnis Mandailing. Ketika sudah bermukim di Medan etnis Mandailing mengambil sikap sosial dengan menceburkan diri sebagai bagian dari upaya akulturasi dan pembauran dengan budaya tuan rumah etnis Melayu.

Sebagian dari identitas kemandailingan itu kemudian disimpan tidak dimunculkan secara terbuka semisal marga yang ada di belakang nama. Begitu pula anak dan cucu mereka yang lahir di Medan tidak lagi disematkan marga-marga Mandailing semisal Lubis, Harahap, atau Nasution meskipun susunan *tarombo* (garis keturunan) tetap disimpan. Sehingga ketika mereka sudah besar tampak lebih besar rasa bangganya disebut sebagai orang Melayu dari pada orang Mandailing sendiri. Tentu ini tidak terlepas dari pemutusan mata rantai budaya dan adat istiadat yang dilakukan oleh ayah atau kakek mereka.

Mereka-mereka yang sudah beradaptasi ini secara sosiologis kemudian mendapat istilah baru yang disebut dengan *Melayu dusun*. Karena sedemikian derasnya perantauan etnis Mandailing ke Medan dan juga naiknya angka kelahiran anak dan cucu mereka di Medan maka tidak mengherankan jika etnis Mandailing kemudian mempengaruhi komposisi penduduk tidak hanya di Medan tetapi juga se-kawasan Sumatera Timur. Semisal pada tahun 1920 penduduk Sumatera Timur berjumlah 1.187.554 jiwa dengan rincian kelompok Indonesia ada Melayu Pesisir (285.553 jiwa), Karo, Simalungun, dan Mandailing (334.329 jiwa), Jawa (353.557 jiwa), Sunda (37.231 jiwa), Banjar (17.258 jiwa), serta Minangkabau (15.002 jiwa) dan adapun kelompok

lainnya ada Tionghoa (134.750 jiwa), Eropa (7.882 jiwa), Asia Luar (11.592 jiwa), dan Arab (400 jiwa) (Pelly, 2017).

*Keempat*, di Medan etnis Mandailing sampai menjelang kemerdekaan tahun 1945 tampaknya tidak begitu ambisi mengambil peranan-peranan politik secara praktis di pemerintahan atau di dunia pergerakan. Hal ini membuat elit-elit Melayu tetap berprasangka baik dan menganggapnya sebagai kelompok yang tidak memiliki potensi “mengganggu” kedudukan mereka. Sehingga sewaktu pelajar-pelajar Mandailing di Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) mendirikan organisasi Al-Washliyah di Medan tahun 1930 pihak kesultanan termasuk tidak berkeberatan. Pemerintah lokal justru memberikan pintu seluas-luasnya bagi Al-Washliyah untuk mengembangkan dakwahnya tidak hanya di Medan tetapi juga di pedesaan-pedesaan yang mana kesempatan itu tidak didapatkan sepenuhnya oleh organisasi tetangganya yakni Muhammadiyah.

*Kelima*, kontribusi lain yang tidak kalah pentingnya sebagai modal sosial etnis Mandailing untuk bisa eksis adalah pembangunan sarana pendidikan Islam. Pada awal abad ke 20 pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem politik etis (politik balas budi) untuk bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan membangun lembaga pendidikan kepada kelompok pribumi. Hanya saja apa yang dilakukan pemerintah kolonial tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat terutama umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Hal ini dikarenakan lembaga pendidikan yang dibangun pemerintah Hindia Belanda tidak memasukkan unsur religi dalam kurikulumnya dengan kebijakan netral agama. Model lembaga pendidikan seperti inilah yang lazimnya disebut sebagai sekolah sekuler.

Kondisi tersebut menjadi kekhawatiran sendiri bagi masyarakat tak terkecuali di Medan. Meskipun selama ini di Medan muncul banyak ulama tetapi model pendidikan yang mereka tawarkan sangat konvensional, pengajarannya hanya sistem *halaqah* dan hafalan, dan yang terpenting tidak menggunakan kurikulum yang terstruktur sebagaimana lazimnya sekolah modern. Aktivitas belajar pun hanya dipusatkan di masjid atau langgar kecil dan sebagiannya di rumah sang guru. Jika ingin sedikit lebih maju mau tidak mau mereka harus merelakan anak mereka belajar di luar dari Medan seumpama yang terdekat ada perguruan Jam'iyah Mahmudiyah di Tanjung Pura, Langkat. Sebagiannya harus belajar ke Minangkabau yang lembaga pendidikannya sudah lebih maju. Jika memenuhi persyaratan bisa ke Makkah atau Universitas Al-Azhar Mesir. Sementara pemerintah lokal sendiri belum mendirikan lembaga pendidikan agama sejenis madrasah atau maktab bagi masyarakatnya.

Sebagai umat Islam etnis Mandailing menyadari betul kondisi ini yang berisiko bisa menjauhkan anak-anak mereka dari agama. Salah satu ulama mereka Syaikh Muhammad Ya'cub bersama tokoh-tokoh Mandailing lainnya di Medan menginisiasi pembangunan lembaga pendidikan yang dinamakan dengan Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) yang lokasinya berada di Jalan Hindu saat ini. Tanah pertapakan untuk pembangunan MIT sendiri adalah wakaf dari salah seorang dermawan Melayu yakni Datuk Haji Muhammad Ali. Surat penyerahannya kemudian didaftarkan di

pemerintahan dengan nomor register 111 yang dikeluarkan dari kesultanan tertanggal 3 Maret 1918.

Adapun untuk biaya pembangunannya diperoleh dari wakaf umat Islam secara umum dan terkhusus dari masyarakat Mandailing sendiri. Panitia pembangunan MIT juga dibantu oleh bos perkebunan Tjong A Fie dari segi penyediaan properti. Tjong A Fie memberikan sumbangannya berupa meja dan bangku yang terbuat dari kayu damar dan bisa memuat 3-4 orang siswa (Tanjung, 2012). Sebagai nazhir wakaf MIT ditunjuklah Syaikh Muhammad Ya'cub, Haji Ibrahim Pengulu Pekan, dan Haji Ibrahim selaku Presiden Syarikat Tapanuli (Bahri, 2023). Peresmian penggunaan MIT dilakukan pada bulan Mei 1918. Pendidikan di MIT dibagi menjadi tiga tingkatan yakni *ibtida'i* (kelas awal), *tsanawi* (menengah), dan *tajhizi* (persiapan). Dari nama maktab tersebut tampak ada sebuah etnisitas yang ingin ditampilkan oleh kalangan Mandailing yang berasal dari Keresidenan Tapanuli di Kota Medan.

Siapa sangka sekitar 12 tahun kemudian para pelajar MIT dan Maktab Hasaniyah membentuk sebuah organisasi Islam bernama Al-Jam'iyatul Washliyah pada tanggal 30 November 1930. Al-Washliyah sendiri ketika itu dianggap sebagai organisasi modern pertama milik etnis Mandailing. Dengan demikian kalangan Mandailing telah menjalankan dua jalur pembentukan kader ulama tidak hanya di MIT tetapi juga sudah berkembang melalui Al-Washliyah. Organisasi ini memang tergolong unik, lahir di kawasan perkotaan tetapi memiliki madrasah-madrasah dengan pola pendidikan yang tidak begitu modern sebagaimana layaknya di lembaga pendidikan milik Belanda atau organisasi Muhammadiyah. Mereka begitu identik dengan kajian kitab *turats* (kitab kuning) yang sangat tradisional. Di sisi lain Al-Washliyah ternyata cukup moderat dengan nilai-nilai kemodernan. Sehingga dapat dimaklumi apabila kemudian hari Syaikh Musthafa Husain Purba Baru umpamanya yang baru pulang dari Makkah sempat menuduh Al-Washliyah sudah kebarat-baratan (Pelly, 2016).

Usaha orang-orang Mandailing yang sudah bernaung di Al-Washliyah dalam memajukan pendidikan Islam di Medan cukup menarik simpati penguasa lokal. Sultan-sultan Melayu begitu memberikan keluasan pada Al-Washliyah untuk mengembangkan dakwah dan pendidikannya. Modal sosial ini kemudian lambat lain menjadi unsur pelekak etnis Mandailing di mata masyarakat muslim Kota Medan tidak terkecuali dengan para sultan itu. Sebagian dari mereka akhirnya ditempatkan sebagai ulama yang banyak memegang otoritas keagamaan. Beberapa ulama Mandailing kesohor yang menjadi tokoh pendidikan Islam begitu harum namanya di Medan sebut saja ada Syaikh Ja'far Hasan (1880-1950), Syaikh Qadhi Muhammad Ilyas (1883-1936), Syaikh Muhammad Yunus (1889-1950), Syaikh Maksun Siregar (1903-1980), Syaikh Mahmud Syihabuddin (1903-1996), Syaikh Muhammad Arsyad Thalib Lubis (1908-1972), Syaikh Abdurrahman Syihab (1910-1955), dan Syaikh Al-Fadhil Haji Adnan Lubis (1910-1966). Mereka banyak memberikan andil di Kota Medan sejak era kolonial hingga kemerdekaan Indonesia dalam berbagai bidang tidak hanya pendidikan tetapi juga bidang lainnya.



## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan bahwa analisis terhadap bentangan sejarah Kota Medan, tampaklah etnis Mandailing menjadi salah satu kelompok masyarakat terpenting di tempat ini khususnya sejak abad 20. Eksistensi mereka dari unsur etnis pendatang cukup diperhitungkan di tengah masyarakat dengan segenap potensi yang dimiliki. Ini semua tentunya tidak terlepas dari modal sosial yang mereka miliki. Mulai dari kesamaan agama dengan kelompok Melayu sebagai masyarakat lokal Medan, corak pemikiran keagamaan yang tradisional dengan masuknya mereka sebagai kelompok muslim *ahlu sunnah wal jama'ah* dan memegang teguh ajaran madzhab Syafi'i. Selain itu etnis Mandailing dikenal sebagai kelompok yang memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa sehingga mampu melakukan dan menerima proses pembauran dengan masyarakat lokal.

Modal sosial lainnya yang tidak kalah penting adalah bahwa etnis Mandailing di Medan pada abad 20 bukanlah kelompok masyarakat yang menyentuh ranah politik sehingga oleh pemerintah lokal menganggap etnis Mandailing bukanlah sebagai kelompok yang membahayakan kedudukan politik mereka. Modal sosial lain yang kian mengangkat eksistensi etnis Mandailing di Medan adalah kontribusi mereka dalam memajukan pendidikan baik secara individual maupun komunal. Secara kelompok mereka berkontribusi dalam memajukan pendidikan terutama dengan adanya Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) yang dibangun tahun 1918. Lembaga ini telah menjadi saluran penting dalam melahirkan kader-kader ulama di Medan. Adapun puncak dari itu semua bahwa pelajar-pelajar dan ulama di MIT telah melahirkan sebuah organisasi modern di Medan yakni Al-Jam'iyatul Washliyah tahun 1930. Dari rahim Al-Washliyah pula bermunculan tokoh-tokoh pergerakan di Medan yang memiliki kontribusi besar di tengah masyarakat baik era kolonial maupun kemerdekaan.

## REFERENSI

- Bahri, S. (2023). *Ulama Mandailing dalam Pentas Sejarah Tanah Deli*. Medan: Prokreatif
- Bahri, S. (2024). *Ulama Minangkabau di Pentas Sejarah Tanah Deli*. Medan: Prokreatif
- Bahri, S. (2024). *Ustadz Arsyad Siregar: Mutiara dari Gunung Manaon*. Medan: Prokreatif
- Lubis, L. A. (2014). Komunikasi antarbudaya etnis tionghoa dan pribumi di kota medan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 13-27. <http://www.jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/83>.
- Pelly, U. (2016). *Etnisitas dalam Politik Multikultural (Buku II)*. Medan: Casa Mesra Publisher.
- Pelly, U. (2017). *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing di Perkotaan*. Medan: Casa Mesra Publisher.
- Pulungan, A. (2008). *Perkembangan Islam di Mandailing*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

- Sari, D. M., & Suri, N. (2024). Mandailing Traditional Marriage Culture Acculturation in Medan City. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), 558-566. [https://www.al-afkar.com/index.php/Afkar\\_Journal/article/view/1139](https://www.al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/1139).
- Sulaiman, N. (1956). *1/4 Abad Al-Djam'ijatul Washlijah*. Medan: PB. Al-Washliyah.
- Takari, M., dkk. (2012). *Sejarah Kesultanan Deli*. Medan: USU Press.
- Tanjung, M. (2012). *Maktab Islamiyah Tapanuli 1918-1942*. Medan: IAIN Press.
- Zebua, A. M. (2019). Muhammadiyah dan Al-Washliyah di Sumatera Utara; Sejarah, Ideologi, dan Amal Usahanya. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(01), 58-69. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/397>.
- Zein, I. I., dkk. (2021). *Memoar Kesultanan Langkat*. Medan: Disbudpar Sumut.